

MEMBANGUN KARAKTER BERUSAHA MASYARAKAT PESISIR

BUILDING CHARACTER OF COASTAL COMMUNITIES

Oleh:

Muhammad Nur Yamin¹, Andi Azka Azizah², Bakhtiar³

¹nuryamin1@gmail.com; ²andiazkaazizah@gmail.com; ³bakhtiar@unm.ac.id

^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pembangunan karakter berusaha masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di Desa Parak Kecamatan Bontomanai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar melalui penyaluran bantuan mesin konverter yang dilihat dari enam (6) indikator terdapat tiga (3) indikator yang sudah berjalan dengan baik yaitu efisiensi, kecukupan, dan perataan hal ini bisa dilihat dari proses penyaluran bantuan secara keseluruhan sudah dianggap berhasil karena berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan tujuan program yaitu adanya penghematan biaya operasional nelayan dan proses pengusulan calon penerima bantuan sudah sesuai dengan persyaratan program, dan terdapat tiga (3) indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu efektivitas, responsivitas, dan ketepatan hal ini bisa dilihat dari jumlah nelayan yang tidak memanfaatkan bantuan sebagaimana mestinya, sampai sekarang masih menggunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan dari program pemberdayaan.

KATA KUNCI: Kebijakan, Karakter, Masyarakat Pesisir

ABSTRACT: This research aims to determine the evaluation of coastal community empowerment policies in Selayar Islands Regency, specifically in Parak Village, Bontomanai District. This research uses qualitative methods and produces descriptive data. Data collection uses interview, documentation and observation techniques. The results of the research show that in the evaluation of coastal community empowerment policies in Parak Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency through the distribution of converter machine assistance, as seen from the six (6) indicators, there are three (3) indicators that have been running well, namely efficiency, adequacy and leveling of matters. This can be seen from the overall aid distribution process which is considered successful because it runs smoothly and is in accordance with the program objectives, namely saving operational costs for fishermen and the process of nominating potential

aid recipients is in accordance with program requirements, and there are three (3) indicators that are not yet running. well, namely effectiveness, responsiveness and accuracy. This can be seen from the number of fishermen who do not use the assistance as they should, only 19 people (27.53%) of the total informants numbering 69 people who until now are still using the assistance provided by the government according to with the aim of the empowerment program.

KEYWORDS: Policy, Character, Coastal Communities

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 negara memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan segala keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan Undang-Undang Desa pemerintah mendorong Desa untuk mandiri. Pemerintah dalam UU Desa memilih pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai alat untuk mensejahterakan warga negara. Formulasi kebijakan publik oleh pemerintah seharusnya melibatkan semua elemen masyarakat termasuk masyarakat pesisir dengan demikian masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat pesisir bisa dituntaskan (Ra'is, 2017).

Masyarakat pesisir umumnya mengalami masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berbeda dengan masyarakat perkotaan di wilayah Indonesia. Masyarakat pesisir cenderung identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan dalam segala hal jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang sudah merasakan perkembangan dan kemajuan teknologi. Hal ini yang menjadi konsentrasi Negara dan pemerintah untuk terus melakukan inovasi dan perubahan pada masyarakat pesisir melalui kebijakan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat.

Wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu wilayah pesisir di Indonesia yang

memiliki potensi sumber daya perairan yang besar, untuk mengembangkan usaha dibidang perikanan tangkap (budidaya tangkap), aspek konservasi sumber daya secara efektif, efisien, optimal, dan berkelanjutan melalui program yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sudah sangat banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, baik berupa bantuan sarana dan prasarana penangkapan serta pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat nelayan dalam menunjang peningkatan produktivitas nelayan selayar. Upaya pemberdayaan masyarakat tidak berbanding lurus dengan peningkatan hasil tangkap nelayan, hal ini dapat kita lihat dari kondisi tingkat kemiskinan masyarakat Selayar didominasi masyarakat pesisir khususnya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Menurut Konita Iladini 2017 dari data BPS indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari aspek lingkungan, pemukiman masyarakat pesisir yang tidak tertata masih terkesan kumuh, tingginya tingkat anak putus sekolah diusia muda, rendahnya tingkat kesehatan,masyarakat, dan rendahnya daya beli masyarakat. Fenomena ini menunjukkan ketidakberdayaan masyarakat pesisir, dan kondisi ini terjadi bukan hanya di Kabupaten Kepulauan Selayar tetapi

secara umum di wilayah- wilayah peisir Indonesia.

Dari persoalan di atas, menjadi konsentrasi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu kegiatan pemberdayaan Pemerintah yang sangat familiar yaitu konversi bahan bakar minyak menjadi gas. Kegiatan ini berupa bantuan mesin katinting 6,5 PK yang dilengkapi dengan tabung gas elpiji yang bertujuan untuk mengurangi beban operasional nelayan dan untuk memperluas ruang gerak penangkapan nelayan. Seharusnya tujuan program ini sudah tercapai karena program ini sudah dimulai sejak tahun 2020, namun yang terjadi kondisi ekonomi masyarakat nelayan tidak mengalami perubahan.

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi sangat besar dibidang kelautan dan perikanan. Namun dalam pengelolaannya terjadi tumpang tindih antar kebijakan pemerintah. Hal ini kemudian memicu terjadinya permasalahan lingkungan, kerusakan sumber daya, dan ketidakmampuan nelayan lokal untuk bersaing dengan nelayan pendatang dari luar daerah yang sudah berskala nelayan modern, memiliki sarana dan prasarana serta alat tangkap yang sudah canggih. Dari segi kebijakan, dengan diambil alihnya pengelolaan laut oleh Pemerintah Pusat yang didelegasikan ke Pemerintah Provinsi menyebabkan tingginya potensi pelanggaran di laut termasuk pemasangan alat bantu penangkapan ikan dan zona operasional yang sudah tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik antar nelayan modern dengan nelayan tradisional. Begitu konfliknya persoalan masyarakat nelayan, disisi lain kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah tidak mampu mengantar masyarakat pesisir untuk berdaya. Hasil

penelitian sebelumnya (Yamin dan Reza, 2023) menyimpulkan dampak yang lebih jelas dari pemberdayaan terhadap kemandirian masyarakat salah satunya ialah berkurangnya ketergantungan dari masyarakat pesisir pulau lakkang terhadap pemerintah, yang walaupun masyarakat pesisir pulau lakkang tidak serta merta langsung melakukan kemandirian akan tetapi setidaknya masyarakat pesisir pulau lakkang akan berusaha memikirkan masa depan dengan bertahap hingga masyarakat pesisir pulau lakkang berhasil melakukan kemandirian terhadap masyarakatnya.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir pada pasal 1 menyebutkan Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya pesisir secara lestari (BPK, n.d.) Dengan adanya peraturan daerah tersebut, seharusnya pemerintah lebih aktif dalam memberikan pendampingan ke masyarakat pesisir dan evaluasi terhadap kebijakan pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Langkah pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai syarat utamanya adalah pengelompokan atau melembagakan masyarakat nelayan berdasarkan kesamaan visi dan tujuan dari kegiatan masyarakat pesisir, salah satu diantaranya: nelayan penangkap ikan, budidaya, ataupun kelompok pengolah hasil laut.

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah nelayan di Desa Parak Kecamatan Bontomanai dijadikan lokasi penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Nelayan Desa Parak Kecamatan Bontomanai

Nama Desa	Kategori Kapal		Jenis Alat Tangkap			Jumlah Kelompok Nelayan
	Bermotor	Tidak Bermotor	Pancing Ulur	Jaring	Tombak	
Parak	62	24	44	40	2	13
Jumlah	86		86			13

Sumber: Data Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2023

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga disebut juga penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn (Debby et.al, 2015) terdiri atas enam indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Dalam penelitian ini, efektivitas dari hasil yang dicapai dalam suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir atau nelayan. Pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan yang tepat dan terarahnya kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuannya. Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan sebagai penerima bantuan yang memakai mesin konverter sebagai tenaga penggerak sampan, memang terjadi proses penghematan bahan bakar jika dibandingkan pada saat mereka memakai BBM sebagai bahan bakar mesin. Temuan dilapangan menunjukkan perbandingan rata-rata pemakaian BBM bensin dengan BBG sebanyak 6 liter bensin seharga Rp 95.000 dengan 1 tabung gas seharga Rp 25.000, terdapat selisih sebesar Rp 65.000 sebagai bentuk penghematan dari pemakaian bahan bakar. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tujuan awal dari program sudah terpenuhi jika hanya dilihat dari evaluasi kebijakan pemerintah. Tetapi fakta lain yang didapati oleh peneliti pada saat wawancara dan observasi jenis bantuan dipenerima bantuan menunjukkan bahwa banyak bantuan yang tidak dipakai secara utuh dengan berbagai argumen sebagai alasan oleh penerima, diantaranya mesin rewel bunyi, panas, takut meledak, dan ruangan sampan sempit. Dari 69 orang jumlah informan hanya 27,53% (19 orang) yang memakai bantuan secara utuh artinya hanya 27,53% (19 orang) yang merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu terjadi penghematan biaya pembelian bahan bakar dengan menggunakan gas sebagai bahan bakar, sementara 50 orang (72,47%) dari total 69 informan yang berarti hanya memanfaatkan bantuan

mesinnya saja dan kembali menggunakan bensin sebagai bahan bakar sehingga 72,47% (50 orang) tersebut tidak merasakan dampak dari tujuan pemberian bantuan. Temuan ini, oleh peneliti sudah melakukan konfirmasi ke pihak Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dan membenarkan informasi dari informan bahwa banyak penerima bantuan yang tidak memanfaatkan dengan baik sesuai tujuan program.

Temuan tersebut selaras dengan pendapat Winarto (Prabawati, 2013) yang menyatakan bahwa efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian yang dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan. Begitu pula selaras dengan efektivitas menurut Dunn (Debby dkk, 2015) menjelaskan bahwa “apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?” dan selaras dengan pendapat Mardiasmo (Elda, 2020) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, untuk efektivitas terhadap implementasi kebijakan pemerintah maka dapat disimpulkan pemberian bantuan mesin konverter oleh pemerintah untuk nelayan kecil dianggap kurang efektif.

Efisiensi

Efisiensi artinya seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar melalui penyaluran bantuan mesin konverter akan dilihat sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah

dalam mendapatkan jumlah bantuan dari Pemerintah Pusat. Salah satu tolak ukurnya adalah perbandingan data nelayan yang bersyarat untuk memperoleh bantuan dengan realisasi.

Berdasarkan hal di atas, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait jumlah nelayan kecil yang didaftar sebagai usulan calon penerima bantuan selama tiga tahap dan telah memenuhi persyaratan dengan tingkat realisasi yang sudah tersalur selama tiga tahap. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh data penerima selama tiga tahap untuk skala Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 3678 orang sama dengan jumlah usulan yang didaftar selama tiga tahap tersebut, untuk Desa Parak sebagai lokus penelitian, jumlah yang terealisasi selama tiga tahap sebanyak 98 orang, sama dengan jumlah usulan awal sebagai calon penerima. Keberhasilan atas capaian maksimal ini, salah satu faktor pendukungnya adalah adanya kegiatan verifikasi awal yang dilakukan pemerintah terhadap nelayan yang benar-benar memenuhi syarat untuk bisa diusulkan sebagai calon penerima bantuan. Temuan tersebut selaras dengan pendapat Winarto (Prabawati, 2013) yang menyatakan bahwa Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat keefektifitas tertentu. Sama halnya menurut Dunn (Debby dkk, 2015) efisiensi berkenaan dengan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hal yang diinginkan.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai hasil maksimal sudah sangat baik karena usulan calon penerima bantuan selama tiga tahap berbanding lurus atau sama dengan tingkat realisasi penyaluran bantuan. Hal ini dapat disimpulkan tingkat efisiensi dari implementasi kebijakan pemerintah

sudah baik, disamping itu dari segi kemanfaatan untuk masyarakat nelayan berdampak adanya pengurangan beban biaya operasional untuk membeli bahan bakar karena terjadi penghematan dan dengan menggunakan gas sebagai bahan bakar mesin jarak tempuh untuk melaut lebih jauh dan ikan yang didapatkan bisa lebih banyak.

Kecukupan

Dalam penelitian ini, kecukupan diartikan sejauh mana kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat menyelesaikan persoalan masyarakat nelayan, baik dalam hal peningkatan ekonomi ataupun sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang aktifitas nelayan. Hal lain yang bisa diukur adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, apakah tidak menimbulkan konflik sosial dimasyarakat pesisir dengan adanya kebijakan bantuan tersebut.

Dari pembahasan di atas, peneliti telah melakukan wawancara dengan informan tentang tingkat kepuasan penerima bantuan, asas manfaat yang diperoleh, dan potensi konflik sosial atau kecemburuan yang terjadi dikomunitas masyarakat pesisir dengan adanya bantuan tersebut. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penghematan terhadap pemakaian bahan bakar sangat membantu meringankan beban nelayan, aktivitas menangkap bisa lebih luas lagi karena biaya operasional sudah berkurang, bisa meningkatkan jumlah tangkapan karena capaian daerah operasional lebih luas. Potensi konflik sosial di masyarakat pesisir tidak ditemukan, hal ini disebabkan karena semua nelayan kecil di Desa Parak yang bersyarat untuk mendapatkan bantuan sudah menerima dengan jenis bantuan yang sama, hanya tingkat pengoperasian mesin yang berbeda-beda.

Nelayan yang memanfaatkan

bantuan secara utuh, akan merasakan penghematan biaya operasional dan nelayan yang hanya menggunakan mesin dan BBM sebagai bahan bakar akan merasakan pemakaian mesin baru dengan merek yang berkualitas. Temuan tersebut selaras dengan pendapat Winarto (Prabawati, 2013) yang menyatakan bahwa kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Sama halnya dengan kecukupan menurut Dunn (Debby dkk, 2015) mengatakan bahwa “seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat menyelesaikan masalah”.

Berdasarkan pembahasan diatas terkait kecukupan, maka peneliti dapat simpulkan bahwa kecukupan sudah maksimal karena telah mencapai hasil yang diinginkan yaitu tujuan dari pemberian bantuan mesin konverter adalah penghematan pengeluaran pembelian bahan bakar dan juga dengan bantuan ini yaitu dengan menggunakan gas sebagai bahan bakar juga dapat membantu nelayan dalam memperluas zona penangkapan, dengan demikian nelayan bisa meningkatkan hasil tangkapannya yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.

Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik, kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kebijakan

yang berorientasi pada Perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil distribusikan, suatu program mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaatnya merata.

Dalam penelitian ini, perataan diartikan sejauh mana bantuan ini bisa memberikan manfaat secara menyeluruh kepada semua unsur dikomunitas masyarakat pesisir secara adil dan merata sehingga tidak terjadi diskriminasi baik dalam hal kelayakan penerima, proses penyaluran, jenis dan spesifikasi bantuan yang diterima. Untuk mengukur hal tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan dengan menggunakan instrumen pertanyaan diantaranya kelayakan atau persyaratan penerima, jumlah nelayan, jumlah penerima, dan jenis bantuan yang telah diterima. Jumlah nelayan di Desa Parak sebanyak 98 orang dan terdapat 13 kelompok nelayan yang ada di dalamnya, dari semua jumlah tersebut semua telah memenuhi persyaratan dimana persyaratan penerima bantuan yaitu memiliki sarana armada di bawah 5 gt, memiliki kartu nelayan kusuka, dan memiliki mesin penggerak, semua sudah terakomodir sehingga penerima bantuan sudah tepat sasaran dan jenis bantuan yang diterima sudah sesuai diantaranya yaitu mendapatkan mesin katinting 6,5 pk merk Honda 1 buah, tabung gas 2 buah yang sudah terisi gas, slank tabung, dan alat konverter yang berfungsi menghubungkan mesin katinting dengan bahan bakar gas/tabung. Temuan tersebut selaras dengan pendapat menurut Winarto (Prabawati, 2013) yang menyatakan bahwa perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Sama halnya dengan perataan menurut Dunn (Debby dkk, 2015) mengatakan perataan yaitu “apakah

biaya dan manfaat didistribusikan secara merata dengan kelompok masyarakat yang berbeda”

Dari hasil wawancara diketahui bahwa calon penerima ditetapkan dengan melakukan pendataan langsung di masyarakat pesisir berdasarkan persyaratan baku dari program pemberdayaan, kemudian dilakukan verifikasi data nelayan oleh penyuluh perikanan, sehingga kelayakan terhadap penerima bantuan sudah sesuai dengan standar dari program pemberdayaan. Jenis bantuan yang diterima semua nelayan selama tiga tahap memiliki kesamaan secara keseluruhan termasuk merek mesin dan jumlah, proses penyaluran dilakukan secara serentak untuk satu desa penerima bantuan yang dihadiri langsung oleh pihak Dinas Perikanan dan Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas terkait perataan, maka peneliti dapat simpulkan bahwa perataan dalam penyaluran bantuan mesin konverter kepada nelayan sudah tepat sasaran baik dalam hal jumlah dan jenis bantuan yang diterima, serta tidak ditemukan diskriminasi nelayan.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas yang berarti tanggapan sasaran kebijakan atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, referensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat.

Dalam penelitian ini, responsivitas adalah tingkat kepuasan masyarakat penerima bantuan terhadap kemanfaatan yang telah diperoleh setelah menggunakan bantuan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan bantuan yang sudah

diperoleh, serta faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan masyarakat nelayan terhadap pemanfaatan bantuan tersebut. Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dari semua penerima bantuan mesin konverter, hanya beberapa orang yang memanfaatkan bantuan secara utuh dalam arti bahwa penggunaan gas sebagai tenaga pendorong mesin. Lebih banyak yang tetap menggunakan bahan bakar bensin, hal ini menggambarkan bahwa hanya satu jenis bantuan yang dipergunakan yaitu mesin, dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh nelayan. Kekhawatiran terhadap pemakaian gas akan menyebabkan kebakaran salah satu faktor penghambat dari pencapaian tujuan program pemberdayaan masyarakat yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Setelah dilakukan klarifikasi dengan Dinas Perikanan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh penerima bantuan, tanggapan dari pihak Dinas Perikanan bahwa akan melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai penggunaan atau pemanfaatan bantuan di masyarakat karena selama ini pihak Dinas Perikanan hanya melakukan evaluasi parsial saja. Temuan ini selaras dengan pendapat Winarto (Prabawati, 2013) yang menyatakan bahwa responsivitas yaitu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan. Begitu pula selaras dengan pendapat Dunn (Debby dkk, 2015) mengatakan bahwa responsivitas yaitu "apakah hasil kebijakan menurut preferensi/nilai program dapat memuaskan masyarakat"

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait Responsivitas, maka

peneliti dapat disimpulkan bahwa responsivitas masih kurang karena bisa kita lihat dari 69 orang jumlah informan hanya 27,53% yang (19 orang) yang merasakan penghematan biaya BBM sebagai hasil dari konversi BBG, sementara 50 orang dari total 69 informan yang berarti 72,47% sudah tidak menggunakan bantuan sesuai dengan tujuan program pemberdayaan karena kembali menggunakan bensin sebagai bahan bakar karena berbagai alasan. Hal ini berarti program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penghematan biaya operasional nelayan tradisional.

Ketepatan

Dalam penelitian ini, melihat bagaimana suatu hasil kebijakan yaitu penyaluran mesin konverter yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketepatan diartikan sebagai kemanfaatan bantuan yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat nelayan dengan mendasari tujuan dari program pemberdayaan yaitu dengan konversi BBM bensin ke BBG sebagai bahan bakar pendorong mesin mampu menghemat biaya operasional, dan menambah ruang operasional tangkap para nelayan yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Peneliti telah melakukan wawancara dengan informan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan bantuan oleh nelayan, dan melakukan pemetaan terhadap jenis bantuan yang terpakai dan tidak terpakai. Dari hasil wawancara dan observasi jenis bantuan di nelayan, disimpulkan hanya sedikit penerima yang menggunakan bantuan secara utuh, lebih banyak yang hanya menggunakan jenis bantuan mesin dengan kembali menggunakan bensin. Hal ini menggambarkan bahwa tujuan program

yaitu adanya pemangkasan biaya operasional nelayan tidak tercapai karena setelah menerima bantuan alat konverter dan tabung gasnya tidak dimanfaatkan. Temuan ini sekaligus menjadi bahan peneliti untuk melakukan klarifikasi ke pihak dinas terkait dan membenarkan bahwa kebanyakan nelayan yang memperoleh bantuan tidak menggunakannya secara utuh. Temuan ini selaras dengan pendapat Winarto (Prabawati, 2013) yang menyatakan bahwa ketepatan merujuk pada nilai tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandas tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Begitu pula selaras dengan pendapat Dunn (Debby dkk, 2015) mengatakan bahwa ketepatan yaitu "apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar- benar berguna atau bernilai".

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketepatan dalam pemanfaatan bantuan tidak tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil olah data hanya 27,53% yang menggunakan bantuan secara utuh, yang berarti hanya 19 orang merasakan penghematan operasional dari 69 penerima bantuan yang menjadi informan penelitian.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat langsung oleh peneliti di lokasi penelitian terhadap kebijakan program pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu pemberian bantuan mesin konverter di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, jika dilihat dari enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N, Dunn terdapat tiga indikator yang sudah

berjalan dengan baik yaitu efisiensi, kecukupan, dan perataan hal ini bisa dilihat dari proses penyaluran bantuan secara keseluruhan sudah dianggap berhasil karena berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan tujuan program yaitu adanya penghematan biaya operasional nelayan dan proses pengusulan calon penerima bantuan sudah sesuai dengan persyaratan program, dan terdapat tiga indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu efektivitas, responsivitas, dan ketepatan hal ini bisa dilihat dari jumlah nelayan yang memanfaatkan bantuan sebagaimana mestinya, sampai sekarang masih menggunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan dari program pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah Dwi. (2023). *Dampak Evaluasi Kebijakan Publik*. Fisip.Umsu. <https://fisip.umsu.ac.id/2023/06/05/dampak-evaluasi-kebijakan-publik/>
- Aslinda. (2023). *Model bijakan Publik*. K-Media.
- Bender, D. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1)*, 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- BPK. (n.d.). *Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 10 Tahun 2011 Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Data Base. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49003/perda-kab-selayar-no-10-tahun-2011>
- BPS Kab.Kep.Selayar. (2021). Indikator Kesejahteraan Rakyat

- Kab.Kep.Selayar.
Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief; Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.
- Cicci Yuliah Manaf. (2021). Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan.*
- Debby. (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. *Acta Diurna*, 4(5).
- Eni kamal. (2013). Kajian Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (G-PEMP) di Sumatera Barat. *Jurnal Pembangunan Manusia.*
- Firyal Akbar. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan Di Indonesia).* Ideas Publishing.
- Intan Fitri Meutia. (2017). *Analisis Kebijakan Publik* (M. Nizar (ed.)). AURA.
- Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS).*
- Konita Iladini. (2021). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab.Kep.Selayar.*
- Muh. Nur Yamin. Reza (2023). *Pemberdayaan Kemandirian Masyarakat Pesisir. Supremasi: Volume XVIII Nomor 2, Oktober 2023 (halaman 233 - 247)*
- Neliyanti & Meyzi Heriyanto. (2013). *Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.*
- Nuryanti Mustari. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.* Leotikaprio.
- Prabawati, I. (2013). Evaluasi Aplikasi E-Health Di Puskesmas Jagir Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik (JAP).*
- Ra'is, D. U. (2017). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. *Reformasi*, 7(1), 29–46. [jurnal.unitri.ac.id > article > download%0A](http://jurnal.unitri.ac.id/article/download/0A)
- Roebyantho. (2013). *Kebijakan Penanganan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).*
- Shahnaz. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan.* Tuwo, A. (2013). *Pengolaan Ekowisata Pesisir dan Laut.* UTMPress.
- William N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003.*